

INTISARI

“Otoritas Kekuasaan Islam Periode 661 M-855 M dalam Pembentukan Genealogi Perawayatan Hadis sebagai Epistemologi Keislaman”. Genealogi perawayatan hadis pada periode 661–855 M menunjukkan bahwa perawayatan hadis tidak hanya merupakan proses transmisi ilmu agama, tetapi juga erat kaitannya dengan dinamika politik. Otoritas kekuasaan Islam pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk epistemologi keislaman, terutama dalam seleksi, kodifikasi, dan validasi hadis. Penelitian ini bertujuan menganalisis ideologi kekuasaan dalam Islam memengaruhi otoritas persepsi dan tindakan perawayatan hadis periode 661 M-855 M. Agar lebih lanjut memahami pembentukan genealogi perawayatan hadis berdampak dalam konteks epistemologi Islam, dengan mempertimbangkan hubungan antara kekuasaan, agama, dan pengetahuan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan genealogis dan analisis epistemologi. Data diperoleh melalui kajian pustaka yang melibatkan kitab-kitab hadis, sejarah Islam, serta pemikiran Hassan Hanafi dan Fazlur Rahman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis sering kali digunakan sebagai alat legitimasi politik oleh penguasa, baik untuk mempertahankan otoritas maupun untuk menekan lawan politik. Hadis yang bertentangan dengan kepentingan penguasa kerap ditekan atau dihilangkan dari arus utama transmisi keislaman.

Temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa perawayatan hadis berkembang dalam struktur kekuasaan yang membentuk otoritas keilmuan melalui sistem *jarḥ wa ta’dīl* dan *rijāl al-Ḥadīth*. Pendekatan epistemologi testimoni dalam ilmu hadis menegaskan bahwa kebenaran hadis tidak hanya bersandar pada teks, tetapi juga pada kredibilitas sosial perawi. Kebaruan yang ditawarkan penelitian ini terletak pada integrasi konsep epistemologi testimoni dengan analisis genealogis, yang membuka ruang kritik terhadap politisasi perawayatan hadis. Implikasi akademiknya adalah perlunya pendekatan yang lebih kritis dan kontekstual dalam memahami hadis, sehingga dapat menghindari klaim kebenaran yang eksklusif dan mempertahankan relevansinya dalam dinamika keislaman kontemporer.

Kata kunci: Epistemologi Islam; Genealogi Hadis; Ideologi Kekuasaan; Otoritas Perawayatan; Politisasi Hadis.

ABSTRACT

The genealogy of hadith transmission during the 661–855 CE period demonstrates that hadith transmission was not merely a process of religious knowledge transfer but was also closely tied to political dynamics. The authority of Islamic rulers during the Umayyad and Abbasid dynasties significantly influenced the epistemology of Islam, particularly in the selection, codification, and validation of hadith. This study aims to analyze how Islamic political ideology shaped the authority of hadith transmission and its impact on the construction of Islamic epistemology.

This research employs a qualitative method with a genealogical approach and epistemological analysis. Data were obtained through literature studies involving hadith compilations, Islamic historical records, and the thoughts of Hassan Hanafi and Fazlur Rahman. The findings indicate that hadith was frequently used as a political legitimization tool by rulers, both to maintain authority and to suppress political opponents. Hadiths contradicting the interests of the ruling powers were often marginalized or excluded from mainstream Islamic transmission.

*A key finding of this study is that hadith transmission developed within power structures that established scholarly authority through the systems of *jarḥ wa ta'dīl* and *rijal al-Hadith*. The epistemology of testimony in hadith studies confirms that the authenticity of hadith is based not only on textual integrity but also on the social credibility of transmitters. The novelty of this research lies in its integration of epistemological testimony with genealogical analysis, opening a critical perspective on the politicization of hadith transmission. Its academic implications highlight the necessity of a more critical and contextual approach to understanding hadith, thereby avoiding exclusive truth claims and maintaining its relevance in contemporary Islamic discourse.*

Keywords: *Epistemology of Islam; Hadith Genealogy; Hadith Politicization; Narration Authority; Political Ideology.*